

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Perkembangan inflasi daerah dalam beberapa periode terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, seiring dengan perubahan kondisi pasokan dan permintaan serta faktor eksternal.

Perkembangan inflasi Provinsi Gorontalo pada Triwulan I - 2026 sebesar 2,60% (yoy) berada dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Triwulan I - 2026 secara umum, tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh kelompok bahan pangan, khususnya komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, bawang merah, tomat, dan ikan segar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, bulan Januari 2026, Provinsi Gorontalo mengalami inflasi sebesar 4,53% (yoy) dan inflasi bulan Februari 2026 sebesar 5,30% (yoy) atau berada di atas batas atas rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy), hal tersebut disebabkan adanya low base effect seiring dengan penerapan kebijakan diskon tarif Listrik periode Januari-Februari 2025.

Berdasarkan data perkembangan harga pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Beras, Cabai Rawit, Tomat, Bawang Merah, dan Ikan Segar menjadi komoditas penyumbang utama inflasi pada triwulan I-2026 di Provinsi Gorontalo.

Pada bulan Januari 2026, harga cabai rawit dikisaran Rp 20.000 - Rp 35.000 per Kg. Kemudian bulan Februari 2026, harganya mulai naik dikisaran Rp 70.000 - Rp 50.000 per Kg. Pada bulan Maret 2026, harga cabai rawit masih tinggi bahkan akhir bulan harganya mencapai Rp 120.000 per Kg. Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas cabai rawit seiring dengan meningkatnya permintaan pada momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta berkurangnya pasokan karena pada lebaran Idul Fitri tidak ada yang memanen cabai rawit.

Komoditas tomat pada bulan Januari 2026 dikisaran Rp 7.000 - Rp 10.000 per Kg. Kemudian bulan Februari 2026 mulai mengalami kenaikan dikisaran Rp 10.000 - Rp 15.000 per Kg. Kenaikan harga tomat dipengaruhi oleh menurunnya pasokan komoditas hortikultura pasca panen yang sudah terjadi sejak akhir Januari hingga awal Februari 2026. Namun pada bulan Maret 2026, komodita tomat mengalami penurunan harga dikisaran Rp 8.000 - Rp 10.000 per Kg. Hal tersebut dipengaruhi oleh pasokan yang aman dan permintaan yang tidak setinggi pada bulan sebelumnya sehingga harga di pasar menurun.

Komoditas ikan segar/ikan tanggkap pada bulan Januari 2026 dikisaran Rp 40.000 - Rp 50.000 per Kg. Mahalnya harga ikan segar/ikan tanggkap dipengaruhi oleh penurunan hasil tangkapan nelayan seiring dengan tingginya gelombang dan kondisi cuaca yang kurang kondusif untuk aktivitas melaut. Kemudian bulan Februari dan maret harganya turun dikisaran Rp 35.000 - Rp 40.000 per Kg. Penurunan harga ikan segar/ikan tanggkap dipengaruhi oleh pasokan yang aman dan permintaan yang tidak setinggi pada bulan sebelumnya sehingga harga di pasar menurun.

Risiko ke depan yang perlu diwaspadai, fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan berdampak pada terganggunya ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis khususnya

beras dan BARITO (Bawang Merah, Rica, Tomat). Selain itu ada potensi terganggunya pasokan BBM dan gas sebagai dampak kondisi geopolitik diperkirakan dapat memicu kenaikan harga secara umum. Kemudian peningkatan permintaan pada komoditas daging ayam dan telur ayam ras untuk kebutuhan SPPG juga perlu diantisipasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan I - 2026 di Provinsi Gorontalo, Cabai Rawit menjadi komoditas yang memberikan sumbangan inflasi besar. Berdasarkan perkembangan harga PIHPS pada bulan Maret 2026, peningkatan harga cabai rawit sebesar 18,41% (mtm). Peningkatan harga cabai rawit dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas cabai rawit seiring dengan meningkatnya permintaan pada momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta berkurangnya pasokan karena pada lebaran Idul Fitri tidak ada yang memanen cabai rawit.

Komoditas Tomat menyumbang inflasi disebabkan oleh menurunnya pasokan komoditas hortikultura pasca panen yang sudah terjadi sejak akhir Januari hingga awal Februari 2026. Komoditas bawang merah yang merupakan bukan produksi Gorontalo mengalami peningkatan harga sebesar 6,93%, hal tersebut disebabkan peningkatan permintaan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Kemudian ikan segar/ikan tangkap juga menyumbang inflasi pada Triwulan I - 2026, hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan hasil tangkapan nelayan seiring dengan tinggi gelombang dan kondisi cuaca yang kurang kondusif untuk aktifitas malaut.

Inflasi yang tinggi tertahan oleh turunnya harga beras. Masih terjaganya pasokan dari panen gadu serta dimulainya penyaluran beras SPHP TA. 2026 pada bulan Maret 2026 oleh Bulog Cabang Gorontalo, relaisasi penyaluran Beras SPHP TA. 2026 hingga 31 Maret 2026 mencapai 1,11% dari target yang sebanyak 2.519 ton.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai strategi pengendalian inflasi terus dilakukan dan menekankan pentingnya sinergi antar anggota TPID Provinsi Gorontalo untuk mendorong realisasi inflasi tetap berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional. Program-program dirumuskan dengan tetap mengacu pada roadmap pengendalian inflasi daerah. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada Triwulan I-2026 tetap mengedepankan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), dengan rincian sebagai berikut:

A. Keterjangkauan Harga

1. Pemantauan harga sembako di pasar tradisional maupun modern oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo
2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di Kabupaten/Kota
4. Penyaluran bantuan sembako oleh Baznas kepada 1.550 warga kurang mampu di Kota Gorontalo
5. Penyaluran bantuan sembako oleh Tim PKK Provinsi Gorontalo kepada 250 penerima

manfaat di Kabupaten/Kota

6. Penyaluran bantuan bahan baku ikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten/Kota

B. Ketersediaan Pasokan

1. Optimalisasi realisasi penyaluran beras SPHP tahun 2025 yang diperpanjang hingga akhir bulan Februari 2026
2. Pemantauan dan pengawasan ketersediaan bahan pokok oleh Satuan Tugas Pangan Daerah Provinsi Gorontalo di Kabupaten/Kota
3. Sidak pasar (Tim Gabungan) yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo dan menysasar pasar rakyat, distributor, pasar retail modern
4. Penyaluran beras SPHP TA. 2026 oleh Bulog Cabang Gorontalo

C. Kelancaran Distribusi

1. Pembahasan rencana KAD antara Kabupaten Bone Bolango dan Kota Tomohon dalam rangka menjaga kelancaran distribusi komoditas tomat ke Gorontalo
2. Fasilitasi Distribusi Pangan pada Gerakan Pangan Murah di Kabupaten/Kota
3. Sinergi antara TVRI, Dinas Ketahanan Pangan, Kelompok Tani binaan Bank Indonesia dalam menyediakan bahan pangan organik pada kegiatan GPM di halaman TVRI

D. Komunikasi Efektif

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi inflasi rutin setiap Senin
 2. Pelaksanaan HLM TPID Provinsi Gorontalo tanggal 4 Februari 2026
 3. Pelaksanaan HLM TPID Kabupaten Boalemo tanggal 20 Januari 2026
 4. Pelaksanaan HLM TPID Kabupaten Puhwato tanggal 21 Januari 2026
 5. Himbauan belanja bijak dari Wakil Gubernur Gorontalo kepada ASN dan Masyarakat dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi tahun 2026
 6. KPwBI Provinsi Gorontalo secara khusus pada tanggal 20 Februari 2026, menyampaikan surat rekomendasi kepada Pemprov Gorontalo untuk segera menambah frekwensi GPM dengan fokus pada komoditas cabai rawit, tomat, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam.
 7. KPwBI Provinsi Gorontalo pada 20 Februari 2026 melalui forum PIRAMIDA (Ngopi Bareng Media) meminta agar media local ikut mensosialisasikan GPM dan kampanye "Belanja Bijak" kepada Masyarakat.
 8. Penyampaian himbauan menjaga stabilitas harga barito dan belanja bijak melalui podcast berjudul "Ria Jadi Favorit, Harga Ikut Naik: Apa Solusinya?" di kanal media social KPwBI
 9. Penyampaian himbauan belanja bijak jelang idul fitri melalui kanal media sosial KPwBI Gorontalo
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada triwulan I-2026 adalah tekanan inflasi diperkirakan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional seiring dengan prakiraan terjaganya harga komoditas pangan dan normalisasi permintaan pasca HKBN Ramadhan dan Idul Fitri serta normalisasi dampak low base effect diskon tarif Listrik. Faktor pendorong inflasi pada bulan April 2026 diperkirakan terutama didorong oleh masih

rendahnya pasokan komoditas pangan hortikultura dan persediaan komoditas beras yang diperkirakan mulai menipis pasca berakhirnya periode panen raya bulan Maret 2026.

Namun demikian inflasi pangan di Provinsi Gorontalo tahun 2026 diproyeksikan tetap terkendali seiring dengan pelaksanaan program prioritas swasembada pangan yang akan meningkatkan produksi komoditas pangan. Selanjutnya kenaikan UMP Gorontalo tahun 2026 sebesar 5,7% menjadi Rp 3.405.144 diperkirakan meningkatkan daya beli Masyarakat dan konsumsi rumah tangga, memberikan dorongan positif pada ekonomi lokal tanpa memicu tekanan inflasi yang signifikan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, tahun 2026 yang dipandang sebagai momentum pemulihan ekonomi Gorontalo, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan Masyarakat, dan stabilitas harga pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada Triwulan I-2026:

A. Keterjangkauan Harga

1. Melakukan pemantauan harga sembako baik di pasar tradisional dan pasar retail modern
2. Menghadapi HBKN Idul Adha 1447 H, diharapkan kepada Bupati/Walikota dan seluruh pihak untuk terus secara masif melaksanakan pasar murah dan GPM di masing-masing wilayahnya dengan komoditas penyumbang inflasi.

B. Ketersediaan Pasokan

Memastikan ketersediaan pasokan beras, bawang merah, cabai rawit, tomat, telur, daging ayam ras, dan daging sapi khususnya menjelang HBKN Hari Raya Idul Adha 1447 H.

C. Kelancaran Distribusi

Akan melakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung distribusi bahan pokok dari luar daerah ke dalam provinsi.

D. Komunikasi Efektif

1. Mendorong TPID Provinsi dan Kab/Kota untuk terus memantau pergerakan harga serta persediaan Beras, Cabai Rawit, Bawang Merah, Tomat, Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Telur dan minyak goreng di level distributor dan konsumen serta pengawasan tata niaga sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
2. Diharapkan OPD teknis provinsi, kabupaten, dan kota secara aktif melakukan pemantauan ketersediaan dan harga sembako khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menghimbau masyarakat untuk belanja bijak.